

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji t Audit Kinerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Publik pada SKPD Kabupaten Cirebon dengan nilai signifikansi $0,423 > 0,05$ yang artinya semakin baik tingkat Audit Kinerja tidak akan mempengaruhi tingkat Akuntabikiutas Publik pada SKPD Kabupaten Cirebon.
2. Berdasarkan hasil uji t Pengendalian Internal berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Publik pada SKPD Kabupaten Cirebon dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang artinya semakin baik tingkat Pengendalian Internal semakin baik pula tingkat Akuntabikiutas Publik pada SKPD Kabupaten Cirebon.
3. Berdasarkan hasil uji t Audit Kinerja dengan Pengawasan Fungsional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Publik pada SKPD Kabupaten Cirebon dengan nilai signifikansi $0,343 > 0,05$ yang artinya Pengawasan Fungsional tidak mampu memoderasi Audit Kinerja terhadap Akuntabikiutas Publik pada SKPD Kabupaten Cirebon.
4. Berdasarkan hasil uji t Pengendalian Internal dengan Pengawasan Fungsional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Publik pada SKPD Kabupaten Cirebon dengan nilai signifikansi $0,014 < 0,05$ yang artinya Pengawasan Fungsional mampu memoderasi Pengendalian Internal terhadap Akuntabikiutas Publik pada SKPD Kabupaten Cirebon.

B. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil perhitungan deskriptif, dalam variabel Audit Kinerja pada pernyataan “Auditor dapat menentukan tingkat pencapaian hasil program yang diinginkan” mendapat nilai rata-rata terkecil, oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi kinerja SKPD dalam melaksanakan program agar auditor dapat menentukan tingkat pencapaian hasil program yang sesuai dengan tujuannya.
2. Berdasarkan hasil perhitungan deskriptif, dalam variabel Pengendalian Internal pada pernyataan “Menurut saya pembentukkan struktur organisasi sudah sesuai dengan kebutuhan instansi” mendapat nilai rata-rata terkecil, oleh karena itu perlu dibenahi dengan struktur organisasi yang sesuai agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan diantara pegawai.
3. Berdasarkan hasil perhitungan deskriptif, dalam variabel Akuntabilitas Publik pada pernyataan “Program-program anggaran dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa dana masyarakat menghasilkan *output* maksimal” mendapat nilai rata-rata terkecil, oleh karena itu perlu penggunaan anggaran sesuai agar *output* yang dihasilkan dalam program sesuai dengan tujuan awal.
4. Berdasarkan hasil perhitungan deskriptif, dalam variabel Pengawasan Fungsional pada pernyataan “SKPD mendapatkan *feedback* dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat” mendapat nilai rata-rata terkecil, oleh karena itu perlu dilakukan penyuluhan kepada masyarakat bahwa masyarakat diperlukan juga dalam mengawasi kegiatan pemerintah, dengan begitu masyarakat dapat memberikan *feedback* yang sesuai.

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON